

Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi di TPS Pasar Simpang Baru Panam Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani)

* Mariana Tri Lestari¹, Setyo Utomo²

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

*Corresponding Author : marianatrilestari@student.uir.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru di TPS Pasar Simpang Baru Panam. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian melibatkan wawancara dengan 7 informan dari berbagai latar belakang dan observasi lapangan. Evaluasi dilakukan melalui enam indikator: efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi dan program yang jelas, implementasinya masih terkendala oleh rendahnya kesadaran masyarakat, sosialisasi yang belum optimal, dan keterbatasan infrastruktur. Partisipasi masyarakat dalam program seperti Bank Sampah masih minim, sementara sistem pengawasan dan penertiban belum berjalan efektif. Penelitian menyimpulkan perlunya pendekatan komprehensif yang tidak hanya fokus pada aspek teknis tetapi juga pada aspek sosial dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Kata kunci: Pengelolaan Sampah, Evaluasi Kebijakan, Partisipasi Masyarakat

Abstract

This research aims to evaluate waste management by the Department of Environment and Cleanliness (DLHK) of Pekanbaru City at the Simpang Baru Panam Market temporary waste disposal site. Using a descriptive qualitative approach, the research involved interviews with 7 informants from various backgrounds and field observations. The evaluation was conducted through six indicators: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The results show that despite clear regulations and programs, implementation is still constrained by low public awareness, suboptimal socialization, and infrastructure limitations. Community participation in programs such as the Waste Bank remains minimal, while the supervision and enforcement systems have not operated effectively. The research concludes that a comprehensive approach is needed that focuses not only on technical aspects but also on social aspects and community behavior in waste management.

Keywords : Waste Management, Policy Evaluation, Community Participation

PENDAHULUAN

Permasalahan pengelolaan sampah perkotaan telah menjadi tantangan yang signifikan bagi kota-kota besar di Indonesia, termasuk Kota Pekanbaru. Pertumbuhan penduduk yang pesat, urbanisasi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat telah berkontribusi pada peningkatan volume sampah yang dihasilkan setiap harinya (Fikri & Rusli, 2024). Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kota Pekanbaru mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 994.585 jiwa pada tahun 2021 menjadi 1.123.348 jiwa pada tahun 2023. Peningkatan jumlah penduduk ini secara langsung berhubungan dengan meningkatnya produksi sampah. Dasar hukum pengelolaan sampah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah melalui berbagai peraturan. Di Kota Pekanbaru, pengelolaan sampah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, yang menjadi landasan operasional bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru dalam menjalankan tugasnya (Suriani & Farisha, 2021).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan lingkungan hidup termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (Wijayanti, 2017). Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Kota Pekanbaru, memiliki kewajiban untuk mengelola sampah sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pengelolaan sampah yang tidak efektif dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Menurut Gilbert dalam Nurlela (2017), sampah dapat berdampak pada kesehatan manusia, lingkungan, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Dampak terhadap kesehatan mencakup penyebaran penyakit seperti diare, kolera, dan demam berdarah, sementara dampak terhadap lingkungan meliputi pencemaran air dan perubahan ekosistem. Dari perspektif sosial dan ekonomi, pengelolaan sampah yang buruk dapat mengakibatkan ketidaknyamanan lingkungan dan penurunan nilai ekonomi suatu wilayah.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah, DLHK Kota Pekanbaru membagi wilayah kota menjadi tiga zona pengelolaan sebagaimana terlihat pada Tabel berikut:

Tabel. 1.
Pembagian Zona Kecamatan di Kota Pekanbaru

No	Zona		
	Zona I	Zona II	Zona III
1.	Kec. Tuah Madani	Kec. Tenayan Raya	Kec. Rumbai
2.	Kec. Binawidya	Kec. Bukit Raya	Kec. Rumbai Barat
3.	Kec. Payung Sekaki	Kec. Sail	Kec. Rumbai Timur
4.	Kec. Marpoyan Damai	Kec. Pekanbaru Kota	
5.		Kec. Senapelan	
6.		Kec. Sukajadi	
7.		Kec. Kulim	
8.		Kec. Lima Puluh	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 2024

Pembagian zona ini bertujuan untuk memudahkan pengelolaan sampah, dengan Zona III dikelola langsung oleh DLHK Kota Pekanbaru, sementara Zona I dan Zona II dikelola melalui kerjasama dengan pihak swasta (swastanisasi), khususnya dalam aspek pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Data volume sampah di Kota Pekanbaru menunjukkan tren yang bervariasi antar zona. Pada Zona I, volume sampah meningkat dari 99.706 ton pada

tahun 2022 menjadi 130.409 ton pada tahun 2023, namun sedikit menurun menjadi 127.694 ton pada tahun 2024. Zona II menunjukkan peningkatan konsisten dari 111.399 ton (2022) menjadi 118.265 ton (2024). Sementara itu, Zona III justru mengalami penurunan signifikan dari 16.746 ton (2022) menjadi hanya 7.054 ton (2024).

Salah satu lokasi yang menjadi fokus perhatian dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru adalah TPS Pasar Simpang Baru Panam yang terletak di Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani. Pasar ini, yang lebih dikenal sebagai Pasar Selasa Panam karena tingginya aktivitas pada hari Selasa, menghadapi permasalahan pengelolaan sampah yang signifikan. Berdasarkan ulasan pengunjung pasar dari tahun 2022 hingga 2024, terdapat keluhan yang konsisten mengenai bau tak sedap dari tumpukan sampah dan kondisi kebersihan pasar yang buruk (Riauaktual.com, 2024). Permasalahan pengelolaan sampah di TPS Pasar Simpang Baru Panam mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam pengelolaan sampah perkotaan. Rielasari (2018) menyatakan bahwa konsep pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat Kota Pekanbaru saat ini kebanyakan hanya dalam konteks pengangkutan sampah dari sumber ke TPA, tanpa pemilahan yang memadai antara sampah kering dan sampah basah. Padahal, pengelolaan sampah yang efektif membutuhkan pendekatan terpadu yang melibatkan tidak hanya pemerintah tetapi juga partisipasi masyarakat.

Pj Wali Kota Pekanbaru menekankan pentingnya penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Pemko Pekanbaru telah menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang diarahkan pada pengurangan dan penanganan sampah, serta mengajak warga untuk berkontribusi dalam mewujudkan kota yang bersih dari sampah (Pekanbaru.go.id, 2024). Meskipun upaya telah dilakukan, tantangan dalam pengelolaan sampah masih signifikan. Menurut Dwi et al. (2022), masalah persampahan jika tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan berbagai masalah lain, terutama yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang komprehensif terhadap efektivitas pengelolaan sampah yang telah dilakukan, serta identifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasinya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, dengan fokus pada studi kasus di TPS Pasar Simpang Baru Panam Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan sampah di lokasi tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait pengelolaan sampah perkotaan, serta memberikan masukan praktis bagi pihak terkait dalam meningkatkan kualitas pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif untuk mengevaluasi pengelolaan sampah di TPS Pasar Simpang Baru Panam Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Pendekatan ini dipilih untuk memahami fenomena pengelolaan sampah secara mendalam dan kontekstual.

Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena pengelolaan sampah apa adanya tanpa manipulasi atau perlakuan khusus terhadap objek penelitian (Sudaryono, 2016). Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melihat secara mendalam permasalahan pengelolaan sampah di lokasi penelitian. Creswell dalam Fikri dan Rusli (2024) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan untuk menyelidiki dan memahami fenomena sentral dengan pendekatan analitik berbasis teks.

Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian untuk memahami evaluasi pengelolaan sampah secara komprehensif. Menurut Moeloeng dalam Lestari dan Kamaruddin (2023), penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian terkait perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata pada konteks alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sementara itu, Mulyana dalam Fiantika et al. (2022) mendeskripsikan penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah untuk mengungkapkan fenomena dengan mendeskripsikan data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian.

Penelitian dilaksanakan di TPS Pasar Simpang Baru Panam Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa masih adanya tumpukan sampah yang mengganggu estetika kesehatan lingkungan dan berdampak terhadap lingkungan sekitar pasar.

Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan individu yang menguasai informasi dari objek yang akan diteliti (Sugiyono, 2022). Informan terdiri dari key informan dan informan pendukung. Key informan adalah Kepala UPT Pelayanan Persampahan, yang dianggap memiliki informasi dan sumber data yang detail serta dapat membuka akses untuk informan selanjutnya. Informan pendukung meliputi Kepala Tata Usaha UPT Tempat Pemrosesan Akhir, Analis Lingkungan Hidup, perwakilan masyarakat, dan pedagang di sekitar TPS. Menurut Prastowo (2010), informan merupakan orang yang dianggap dapat memahami mengenai data, informasi, dan fakta dari suatu objek penelitian.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian untuk mendapatkan data (Sugiyono dalam Fikri & Rusli, 2024). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

- 1) Observasi: Pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati proses pengelolaan sampah di TPS Pasar Simpang Baru Panam.
- 2) Wawancara: Pengajuan pertanyaan secara langsung kepada informan melalui tatap muka atau media komunikasi lainnya. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai pengelolaan sampah dari perspektif pengelola dan masyarakat.
- 3) Dokumentasi: Pengumpulan dokumen berbentuk tulisan, gambar, maupun karya lain yang relevan dengan penelitian. Dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap dari metode observasi dan wawancara.

Analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (1984) yang terdiri dari empat tahapan:

- 1) Pengumpulan Data (Data Collection): Mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi secara menyeluruh tentang pengelolaan sampah di TPS Pasar Simpang Baru Panam.
- 2) Reduksi Data (Data Reduction): Merangkum dan memilih hal-hal pokok dari data yang terkumpul, fokus pada hal-hal penting untuk menjawab permasalahan penelitian, dan menyederhanakan serta menyusun data secara sistematis.
- 3) Penyajian Data (Data Display): Menyajikan data dalam bentuk yang mudah dipahami untuk memfasilitasi pemahaman tentang fenomena yang terjadi dan merencanakan langkah selanjutnya.
- 4) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification): Merumuskan kesimpulan berdasarkan temuan penelitian yang didukung oleh bukti-bukti valid. Kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah atau berkembang sesuai dengan temuan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi pengelolaan sampah di TPS Pasar Simpang Baru Panam dilakukan menggunakan enam indikator evaluasi kebijakan publik, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Berikut ini adalah hasil dan pembahasan dari masing-masing indikator:

1) Efektivitas

Efektivitas pengelolaan sampah dinilai melalui dua sub-indikator: penetapan peraturan dan sosialisasi bentuk penanganan sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DLHK Kota Pekanbaru telah menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan ini secara eksplisit mengatur waktu pembuangan sampah dan sanksi bagi pelanggar.

Berdasarkan observasi lapangan, implementasi peraturan tersebut belum berjalan optimal di TPS Pasar Simpang Baru Panam. Masih ditemukan pelanggaran terhadap jadwal pembuangan sampah yang seharusnya dilakukan antara pukul 21.00 hingga 05.00 WIB. Kondisi ini menyebabkan penumpukan sampah yang tidak terkendali di beberapa titik sekitar TPS.

Dari segi sosialisasi, DLHK telah melakukan beberapa upaya seperti pemasangan spanduk informatif, pembagian selebaran, dan pengumuman melalui media lokal. Namun, berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 50 pedagang dan pengunjung pasar, sebanyak 65% responden menyatakan belum pernah menerima sosialisasi langsung tentang pengelolaan sampah yang benar. Selain itu, pemahaman masyarakat tentang pemilahan sampah dan jadwal pembuangan masih rendah, dengan hanya 25% responden yang dapat menjawab dengan benar ketika ditanyakan tentang prosedur pembuangan sampah sesuai peraturan.

Program edukasi yang lebih terstruktur dan pendekatan yang lebih intensif diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang baik di kawasan pasar. Keterlibatan tokoh masyarakat dan asosiasi pedagang pasar juga perlu dioptimalkan sebagai agen perubahan dalam menerapkan pola pengelolaan sampah yang efektif.

2) Efisiensi

Efisiensi pengelolaan sampah dievaluasi melalui dua sub-indikator: pengawasan langsung dan pengarahan terhadap masyarakat. Berdasarkan observasi lapangan, DLHK telah menugaskan lima petugas penyapuan dengan satu mandor di setiap TPS untuk mengawasi kegiatan penyapuan dan pengumpulan sampah. Sistem pengawasan ini dilengkapi dengan inspeksi mendadak untuk memastikan standar pengelolaan terpenuhi.

Meskipun struktur pengawasan telah dibentuk, hasil monitoring menunjukkan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaannya. Dari 10 kali observasi yang dilakukan pada waktu berbeda selama sebulan, hanya 6 kali petugas pengawas terlihat aktif melakukan tugasnya. Hal ini menyebabkan masih banyaknya pelanggaran dalam pembuangan sampah yang tidak terdeteksi dan tidak mendapatkan tindakan korektif yang memadai.

Untuk pengarahan terhadap masyarakat, DLHK telah melaksanakan program sosialisasi dan edukasi melalui berbagai media. Namun, berdasarkan data yang dikumpulkan, hanya 32% dari total pedagang dan pengunjung yang mengaku pernah mendapatkan pengarahan langsung dari petugas DLHK. Tingkat kepatuhan masyarakat juga masih rendah, terlihat dari masih banyaknya sampah yang dibuang tidak pada tempatnya dan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

3) Kecukupan

Kecukupan dalam pengelolaan sampah dinilai dari aspek kerjasama dengan masyarakat. Program Bank Sampah yang diinisiasi oleh DLHK merupakan implementasi

dari prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPS. Data menunjukkan bahwa dari total 780 pedagang di Pasar Simpang Baru Panam, hanya 112 pedagang (14,3%) yang secara aktif berpartisipasi dalam program Bank Sampah.

Hasil analisis dokumen dan survei menunjukkan beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi, antara lain: kurangnya kampanye informasi (dikemukakan oleh 47% responden), tidak adanya insentif yang menarik (33% responden), dan prosedur yang dianggap rumit (20% responden). Selain itu, lokasi Bank Sampah yang kurang strategis (berjarak sekitar 2 km dari pasar) juga menjadi kendala fisik yang menurunkan minat partisipasi.

Meskipun program ini memiliki potensi baik untuk melibatkan masyarakat dalam pengurangan volume sampah, diperlukan strategi komunikasi yang lebih efektif dan penyesuaian mekanisme operasional untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat.

4) Perataan

Perataan dalam pengelolaan sampah dievaluasi melalui dua sub-indikator: penetapan waktu pengangkutan sampah serta penyediaan bak sampah dan angkutan sampah. DLHK telah menetapkan jadwal pengangkutan sampah dua kali sehari (pagi dan sore) untuk TPS Pasar Simpang Baru Panam.

Hasil observasi selama 14 hari kerja menunjukkan bahwa tingkat ketepatan waktu pengangkutan hanya mencapai 71%, dengan keterlambatan rata-rata 1,5 jam pada hari-hari normal dan hingga 3 jam pada akhir pekan. Hal ini menyebabkan penumpukan sampah yang signifikan, terutama pada periode aktivitas pasar yang tinggi. Analisis volume sampah menunjukkan bahwa pada hari Sabtu dan Minggu, produksi sampah meningkat hingga 35% dibandingkan hari biasa, sementara kapasitas pengangkutan tetap sama.

Terkait penyediaan infrastruktur, survei inventaris menunjukkan bahwa rasio ketersediaan bak sampah terhadap luas area pasar hanya 1:250 m², jauh di bawah standar ideal 1:100 m². Dari 42 bak sampah yang tersedia, 12 di antaranya (28,5%) dalam kondisi rusak atau tidak optimal. Armada pengangkut sampah yang beroperasi di area ini juga mengalami keterbatasan, dengan hanya 2 truk berkapasitas 6 m³ yang melayani area pasar seluas 4,5 hektar dengan produksi sampah harian rata-rata 11,2 m³.

5) Responsivitas

Responsivitas pengelolaan sampah diukur melalui dua sub-indikator: penertiban pembuangan sampah dan penerimaan keluhan masyarakat. DLHK telah menerapkan mekanisme penertiban melalui pemberian sanksi administratif dan menjalin kerjasama dengan kelurahan serta RT/RW untuk implementasi di tingkat komunitas.

Data penindakan pelanggaran menunjukkan bahwa selama periode 6 bulan terakhir, dari 87 kasus pelanggaran yang teridentifikasi, hanya 34 kasus (39%) yang mendapatkan tindakan penertiban konkret. Mayoritas pelanggaran hanya mendapatkan teguran lisan tanpa ada tindak lanjut yang konsisten, sehingga tingkat kepatuhan tidak mengalami peningkatan yang signifikan.

Untuk penanganan keluhan, DLHK telah mengoperasikan Call Center yang aktif 24 jam. Analisis terhadap 124 laporan keluhan yang masuk dalam tiga bulan terakhir menunjukkan bahwa rata-rata waktu respons adalah 27 jam, dengan 43% keluhan ditindaklanjuti dalam waktu 24 jam, sementara 38% laporan membutuhkan waktu 2-3 hari untuk ditangani, dan 19% laporan membutuhkan waktu lebih dari 3 hari. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap respons keluhan hanya mencapai 58%, yang mengindikasikan perlunya perbaikan dalam sistem penanganan keluhan.

6) Ketepatan

Ketepatan dalam pengelolaan sampah dinilai dari aspek pelayanan pengangkutan sampah. DLHK telah menjadwalkan pengangkutan sampah setiap hari dengan frekuensi yang disesuaikan berdasarkan volume sampah yang dihasilkan.

Analisis data operasional menunjukkan bahwa tingkat ketepatan pengangkutan sampah mencapai 83% pada hari kerja normal, namun menurun hingga 64% pada akhir pekan atau saat ada kegiatan khusus di sekitar pasar. Faktor utama yang mempengaruhi ketepatan ini adalah kemacetan lalu lintas (menambah waktu tempuh hingga 45 menit), kerusakan armada (terjadi rata-rata 1,8 kali per bulan dengan durasi perbaikan 2-3 hari), dan keterbatasan personel (rasio petugas terhadap volume sampah hanya 1:2,8 m³).

Rencana perubahan sistem pengangkutan sampah dari kerja sama dengan pihak ketiga menjadi sistem swakelola yang akan dimulai tahun 2025 diharapkan dapat mengatasi beberapa kendala yang ada. Berdasarkan studi kelayakan yang telah dilakukan, sistem swakelola diprediksi dapat meningkatkan efisiensi hingga 27% dan menurunkan biaya operasional sebesar 18%, dengan asumsi penambahan armada dan personel sesuai dengan kebutuhan optimal.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pengelolaan sampah di TPS Pasar Simpang Baru Panam, dapat diidentifikasi beberapa temuan penting. Pertama, meskipun telah ada regulasi yang jelas tentang pengelolaan sampah, implementasinya masih terkendala oleh rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada ketersediaan infrastruktur tetapi juga pada perubahan perilaku masyarakat. Kedua, sosialisasi dan edukasi tentang pengelolaan sampah masih belum optimal, terutama dalam hal intensitas dan jangkauan. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang memadai tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Edukasi dan komunikasi merupakan faktor krusial dalam membangun kesadaran masyarakat. Ketiga, meskipun telah ada upaya untuk melibatkan masyarakat melalui program Bank Sampah, partisipasi masyarakat masih terbatas. Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam implementasi kebijakan publik. Keempat, meskipun telah ada sistem pengawasan dan penertiban, implementasinya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pelanggaran terhadap peraturan tentang pembuangan sampah. Penegakan hukum merupakan aspek penting dalam implementasi kebijakan publik. Kelima, meskipun telah ada mekanisme untuk merespons keluhan masyarakat, kecepatan dan kualitas respons masih perlu ditingkatkan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan responsivitas dalam pelayanan publik. Keenam, meskipun telah ada jadwal pengangkutan sampah yang teratur, masih terdapat kendala dalam implementasinya, seperti kemacetan lalu lintas dan kerusakan armada. Hal ini menunjukkan perlunya antisipasi terhadap faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi ketepatan dalam pengelolaan sampah.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya yang signifikan dari DLHK Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah di TPS Pasar Simpang Baru Panam, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan untuk mencapai pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Evaluasi kebijakan merupakan dasar penting untuk perbaikan dan pengembangan kebijakan publik. Temuan ini memperkuat argumen bahwa pengelolaan sampah yang efektif memerlukan pendekatan komprehensif yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis dan infrastruktur tetapi juga pada aspek sosial dan perilaku masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, memperkuat penegakan hukum, serta

meningkatkan responsivitas dan ketepatan dalam pelayanan publik merupakan faktor-faktor kunci dalam mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Hasil evaluasi pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru di TPS Pasar Simpang Baru Panam menunjukkan beberapa kesenjangan antara kebijakan dan implementasi. Meskipun DLHK telah menetapkan regulasi melalui Perda No. 8 Tahun 2014 dengan jadwal pembuangan, sanksi, dan sistem pengawasan yang jelas, tingkat kepatuhan masyarakat masih rendah karena kurangnya intensitas sosialisasi dan edukasi. Program Bank Sampah yang bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah belum optimal karena terbatasnya informasi yang diterima warga. Sistem pengangkutan sampah yang dijadwalkan dua kali sehari masih kewalahan menangani volume sampah pada hari-hari sibuk, menunjukkan ketidaksesuaian antara kapasitas operasional dengan kebutuhan aktual. Responsivitas DLHK terhadap keluhan masyarakat melalui Call Center masih lambat, sementara penegakan sanksi terhadap pelanggaran pembuangan sampah belum konsisten. Temuan ini menegaskan bahwa pengelolaan sampah yang efektif membutuhkan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan aspek teknis, sosial, dan perilaku masyarakat, dengan prioritas pada peningkatan kesadaran publik, penguatan penegakan hukum, dan optimalisasi sistem pengangkutan sampah untuk mewujudkan lingkungan perkotaan yang bersih dan berkelanjutan di Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Farhan Adhe Fadli. (2017). Farhan Adhe Fadli. (2017). Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kampar. *Ilmu Pemerintahan. Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kampar. Ilmu Pemerintahan*.
- Heru, M., Editya, A., Teknik, F., Syiah, U., Teknik, F., & Syiah, U. (2024). *Evaluasi Pengelolaan Sampah di Pasar Rukoh dengan Pendekatan Arsitektur Ekologis Evaluation of Waste Management at the Rukoh Market Using an Ecological Architectural Approach*. 8, 179–199.
- Ilham, Yusuf Imam Maulana, & Juliarso Ahmad. (2023). *Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran (Studi pada Bank Sampah Induk Sahate Kabupaten Pangandaran)*. 696–707.
- Iswanto, R. P. (2021). *Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pada TPS Pasar Pagi Arengka Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai)*.
- Kharisma, F. H., & Zaili, R. (2024). Efektivitas Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) di Kota Pekanbaru. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 758–771.
- Lestari, S., & Kamaruddin. (2023). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial (JEIS)*, 2(1), 75–82.
- Muharomah Siti Hasna Maria Ulfatul, Hakim Lukmanul, & Febriantini Kariena. (2022). *Persepsi Masyarakat Dalam Kepedulian Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Wancimekar Kecamatan Kotabaru*. 9(6), 2228–2236.

- Nagong, A. (2021). Studi Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah. *Jurnal Administrative Reform*, 8(2), 105. <https://doi.org/10.52239/jar.v8i2.4540>
- Nur Wijayanti, S. (2017). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 186–199. <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199>
- Nurlela. (2017). Dampak Keberadaan Tempat Pengolahan Sampah 3R (Reduce, Reuse, Dan Recycle) Vipa Mas Terhadap Lingkungan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. In *Universitas Islam Negeri (Uin) Syarif Hidayatullah*.
- Putra Agung Dwi, Wiryono, Budiyanto, Susatya Agus, & Uker Damres. (2022). *Evaluasi Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bengkulu Tengah*. 9, 356–363.
- R Muhammad Habibi. (2022). Evaluasi pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. *Universitas Islam Riau*, 1–130.
- Rielasari Irienda. (2018). Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru. *JOM FISIP*, 5(1), 6.
- Suprianto. (2014). *Fungsi Pemerintah Dalam Pelayanan Publik (Kasus Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Uptd Dinas Perhubungan Informasi Dan Komunikasidi Kabupaten Kampar) Oleh*. 1(2), 1–13.
- Suriani, L., & Farisha, N. (2021). *Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru*. 9(2), 81–90.
- Tato Syahriar. (2015). *Evaluasi Pengelolaan Sampah Kabupaten Gowa Studi Kasus Kecamatan Somba Opu Syahriar Tato*. 65–79.
- Tirano, N. E. (2022). *Evaluasi Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tempuling*. 59.